

Judul : Fasilitas wakil rakyat, kaji ulang tunjangan perumahan DPR yang setara gaji 36.000 guru
Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

FASILITAS WAKIL RAKYAT

Kaji Ulang Tunjangan Perumahan DPR yang Setara Gaji 36.000 Guru

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan perlu dikaji ulang. Publik menilai kebijakan itu justru membebani keuangan negara karena anggaran yang harus disiapkan relatif besar, hingga Rp 1,74 triliun untuk lima tahun masa jabatan. Apabila gaji guru diasumsikan sebesar Rp 4 juta per bulan, kebutuhan anggaran perumahan DPR itu diperkirakan setara dengan gaji 36.000 guru dalam setahun.

Kenaikan pendapatan anggota DPR sebesar Rp 3 juta per hari ramai dibicarakan publik, beberapa waktu belakangan. Isu ini mencuat setelah anggota Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menyatakan, gaji bersih anggota DPR bisa lebih dari Rp 100 juta per bulan. Kenaikan terjadi karena pada periode 2024-2029, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan, tetapi diganti dengan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, mendesak pemerintah dan DPR mengkaji ulang rencana pemberian tambahan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR. "Secara keseluruhan, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 1,74 triliun untuk memberikan tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR selama masa jabatan lima tahun. Nominal ini sangat besar," tuturnya, Rabu (20/8/2025).

Seira juga menilai, pemberian tambahan tunjangan ini tidak tepat karena dirancang saat

pemerintah tengah melakukan efisiensi dan memangkas anggaran di sektor vital, seperti kesehatan dan pendidikan. Pemangkasan itu akhirnya berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang diterima masyarakat.

ICW juga menilai kebijakan tersebut sangat ironis. Hal ini mengingat masyarakat kini tengah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Anggaran Rp 1,74 triliun untuk tunjangan perumahan anggota DPR itu dapat dipakai untuk menggaji sekitar 36.000 guru atau dosen selama satu tahun. Ini bila gaji guru dan dosen diasumsikan sebesar Rp 4 juta per bulan.

Sekjen Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Mublah Hasan menambahkan, kebijakan itu kontraproduktif dengan tujuan awal arah pemerintah. Tunjangan perumahan DPR tergolong pemborosan anggaran negara karena seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Ia juga mengkritisi tunjangan rumah dinas DPR dengan skema lumpsum tidak transparan dan punya potensi disalahgunakan. Hal ini terutama jika tidak ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaannya. Dalam hal ekonomi, tunjangan rumah dinas dapat memperlebar kesenjangan antara anggota DPR dan rakyat.

Dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang masih membutuhkan banyak perbaikan, menurut Mublah, anggaran sebaiknya diprioritaskan un-

tuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran itu bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Klarifikasi DPR

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengklarifikasi pernyataannya mengenai kenaikan tunjangan beras dan bensin yang diterima anggota DPR pada periode ini. Ia mengungkapkan, tunjangan beras yang diterima sebesar Rp 200.000 per bulan, bukan Rp 10 juta yang kemudian naik menjadi Rp 12 juta sebagaimana ia sampaikan sebelumnya.

Ia juga meluruskan soal tunjangan bensin. Besaran yang diterima setiap bulan tetap Rp 3 juta, bukan Rp 7 juta sebagaimana disebutkan sehari sebelumnya.

Dalam kesempatan itu Adies juga memastikan tidak ada kenaikan gaji pokok anggota DPR. Namun, saat ini anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan karena tidak lagi memperoleh rumah dinas sebagaimana periode sebelumnya. Rumah dinas DPR telah dikembalikan dan dialihfungsikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi, saya sampaikan, tidak ada kenaikan gaji. Yang ada hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu karena rumah dinas dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Jadi, itu klarifikasi saya. Semoga tidak menimbulkan polemik di masyarakat," ujarnya, kemarin. (DNA:HOW)